

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di dalam dunia usaha sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), apalagi dalam perkembangan bisnis menghadapi persaingan global sekarang ini. Semua bermula dari skandal Enron dan WorldCom di Amerika yang membuat perusahaan – perusahaan di dunia untuk semakin memperhatikan peran *corporate governance*.

Enron adalah perusahaan raksasa ke -7 dalam ukuran nilai pasar, dan terbesar di bidang energi dan perdagangan energi. Enron mencatat pertumbuhan penjualan dari USD 31 miliar dari tahun 1988 menjadi USD 100 miliar pada tahun 2000. Nilai pasar meningkat sampai USD 50 miliar dalam empat tahun terakhir, namun secara mengejutkan dinyatakan pailit pada 2 Desember 2001. Banyak analis menyebut bahwa faktor utama penyebab jatuhnya Enron adalah adanya masalah kepentingan pemegang saham mayoritas dengan manajemen. Skandal Enron bukan hanya petaka bagi perusahaan tersebut, tetapi juga bagi para pegawainya, karena sebagian besar uang pegawainya ditanam dalam saham perusahaan sehingga mereka kehilangan uang pensiun, juga hilangnya mata pencaharian ribuan karyawan Enron.

Demikian juga dengan skandal Worldcom. Selama tahun 1990an Worldcom melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan telekomunikasi lain yang kemudian meningkatkan pendapatannya dari USD 152 juta pada tahun 1990 menjadi USD 392 miliar pada 2001, yang akhirnya menempatkan Worldcom pada posisi ke 42 dari 500 perusahaan besar menurut versi majalah Fortune . Pada

Worldcom terjadi masalah fundamental di bidang ekonomi yaitu terlalu besarnya kapasitas telekomunikasi. Masalah ini terjadi pada tahun 1998 ketika Amerika mengalami resesi ekonomi sehingga permintaan pasar terhadap infrastruktur internet berkurang sangat drastis. Hal ini berdampak pada pendapatan Worldcom yang juga menurun drastis sehingga pendapatan Worldcom sangat jauh dari yang diharapkan, padahal untuk membiayai akuisisi dan investasi infrastruktur Worldcom banyak menggunakan sumber pendanaan dari luar atau hutang. Keadaan ini yang membuat pihak manajemen berusaha menutupi dengan praktek-praktek akuntansi untuk menghindari berita buruk tersebut.

Demikian pula terjadi di Indonesia dengan terungkapnya skandal Waskita Karya, salah satu BUMN di bidang Jasa Konstruksi yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan. Terkuaknya kasus ini berawal pada saat pemeriksaan dalam rangka penerbitan saham perdana, menemukan pencatatan yang tidak sesuai, dimana ditemukan adanya kelebihan pencatatan sebesar Rp 400 miliar. Dan Direksi periode sebelumnya diduga sudah melakukan rekayasa keuangan sejak tahun 2004 - 2008 dengan cara memasukkan proyeksi pendapatan proyek multi tahun ke depan sebagai pendapatan tahun tertentu. Di tengah gambar gembornya pelaksanaan implementasi *good corporate governance* BUMN, kasus ini memberi tamparan keras kepada Kementerian Negara BUMN agar lebih berupaya lebih lagi dalam implementasi *good corporate governance* di BUMN.

Lemahnya penerapan *corporate governance* merupakan salah satu penyebab utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Dan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dunia yang terjadi

pada pertengahan tahun 1997. Kelemahan tersebut dapat terlihat dari kurangnya pelaporan kinerja keuangan perusahaan, kurangnya pengawasan terhadap aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, dan juga kurang intensif dari pihak eksternal untuk mendorong efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*. Krisis ekonomi tahun 1997 mengguncang dunia, terutama di negara-negara berkembang yang diawali dengan terdepresiasi mata uang negara-negara tersebut dengan mata uang Dollar Amerika yang memberikan dampak yang sangat besar kepada semua aspek kehidupan, terutama di bisnis suatu perusahaan. Akibatnya bisnis perusahaan-perusahaan terpuruk dalam perdagangan termasuk kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian juga di Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi dunia pada pertengahan tahun 1997, memberikan dampak yang cukup besar kepada pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya kejadian ini, peran *corporate governance* menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang lebih stabil. Pada perusahaan korporasi yang relatif besar, pada umumnya terdapat pemisahan fungsi pemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Pemegang saham mendelegasikan wewenangnya dan memberikan hak pengendalian residual (*residual control right*) kepada para manajer untuk mengelola perusahaan. Pemilik sebagai pemberi modal pada umumnya akan mengalami kesulitan untuk memastikan apakah kinerja para manajer telah sesuai atau selaras dengan apa yang diharapkan oleh pemilik.

Pemegang saham tentu mengharapkan manajemen untuk bertindak secara profesional dalam mengelola perusahaan. Dan setiap keputusan manajemen yang

diambil seharusnya didasarkan kepada kepentingan pemegang saham dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Manajer diharapkan dapat memberikan pengembalian atas investasi yang sudah ditanamkan oleh para pemegang saham. Sedangkan di pihak lain, para manajer yang mengelola perusahaan tentu mempunyai pemikiran yang berbeda terutama yang berhubungan dengan peningkatan potensi individu dan kompensasi yang diterima. Karena pada dasarnya manusia cenderung untuk mendahulukan kepentingan pribadinya di atas kepentingan orang lain (*self interest behavior*).

Pada umumnya perusahaan cenderung bergantung pada modal dari pihak eksternal untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan harus meyakinkan para penyandang dana eksternal bahwa investasi mereka akan digunakan secara tepat dan efisien. Manajemen juga harus memastikan bahwa manajer bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian seperti itu dapat diberikan oleh sistem tata kelola suatu perusahaan (*corporate governance*). Dimana sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang saham dan kreditor, sehingga mereka dapat yakin akan memperoleh investasinya kembali dengan wajar dan bernilai tinggi.

*Corporate governance* adalah pedoman bagi para manajer untuk mengelola perusahaan dengan cara *best practice*. Para manajer dapat membuat keputusan keuangan yang menguntungkan semua pihak (*stakeholder*). Mereka dapat bekerja dengan efektif serta efisien sehingga dapat menekan biaya modal, mampu

meminimalkan resiko, dan juga meningkatkan nilai saham perusahaan serta meningkatkan citra perusahaan di mata publik.

*Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan dan prosedur yang menjamin para manajer untuk menerapkan prinsip – prinsip manajemen yang berbasis nilai. Prinsip tersebut adalah *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*. Esensi dari tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa tujuan utama pemegang saham dan kekayaan manajemen diterapkan.

Penerapan *good corporate governance* juga menjadi masalah yang sangat penting di dalam dunia perbankan. Dalam sektor perbankan, penerapan *good corporate governance* juga mendapat perhatian khusus. Dalam beberapa tahun belakangan ini diguncang oleh berbagai kasus seperti di Citibank dan Bank Mega. Dana nasabah Citibank dibobol oleh Malinda Dee mantan relationship manajernya, yang menarik adalah ternyata dana nasabah tersebut ditarik tanpa sepengetahuan oleh pemilik dengan menggunakan slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah sebelumnya dengan total kerugian sebesar Rp 17 miliar. Belum tuntasnya pengusutan atas dugaan penggelapan dana nasabah Citibank Indonesia, Bank Indonesia juga harus dihadapkan dengan kasus pembobolan bank lain. Bank Indonesia juga harus mengusut kasus pembobolan dana deposito PT Elnusa Tbk yang diperkirakan mencapai Rp 111 miliar di Bank Mega Cabang Jababeka, Cikarang. Pada sebuah kajian yang dibuat oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi *good corporate governance* adalah salah satu faktor penting terjadinya krisis ekonomi yang terjadi selama ini di Asia Tenggara.

Semenjak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang menghancurkan berbagai sendi perekonomian Indonesia. salah satunya adalah di sektor perbankan. Sehingga menyebabkan menurunnya kinerja perbankan nasional pada saat itu. Dalam seminar tentang restrukturisasi perbankan pada tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab turunnya kinerja perbankan antara lain karena meningkatnya kredit bermasalah perbankan yang membuat bank harus menyediakan cadangan penghapusan hutang yang besar sehingga membuat kemampuan bank memberikan kredit menjadi sangat terbatas, karena dampak likuiditas bank yang membuat turunnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan pemerintah, sehingga memicu penarikan dana bank yang secara besar-besaran, semakin membuat permodalan bank-bank turun, dan banyak bank tidak mampu melunasi kewajibannya karena turunnya nilai tukar rupiah karena manajemen bank yang tidak profesional.

*Pilot Project Self Assessment* adalah salah satu mekanisme yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat *good corporate governance* perbankan di Indonesia. Proyek ini dilakukan pada September 2007 terhadap 130 bank termasuk kantor cabang bank asing. Penilaiannya dilakukan pada 11 aspek. Dan dari 130 bank yang dinilai, 12 bank memperoleh kategori sangat baik, 76 bank memperoleh kategori baik, 39 bank memperoleh kategori cukup baik, dan 3 bank memperoleh kategori kurang baik. Lebih lanjut, BI menyebutkan bahwa, 53,5 persen bank di Indonesia tidak memiliki komisaris independen, 30,7 persen bank tidak membentuk komite secara lengkap, dan 18,8 persen bank tidak

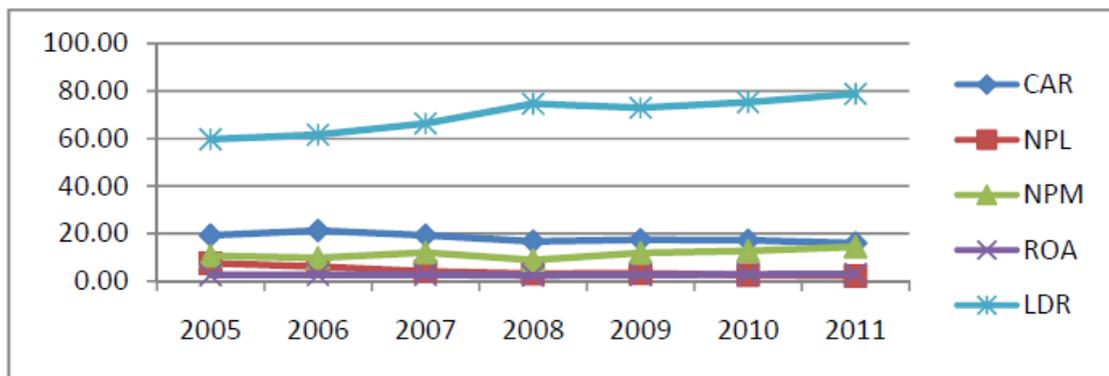
memiliki jumlah komisaris yang lebih besar dari jumlah direksi. Dan dari penelitian Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance* masih sebatas peraturan yang belum menjadi budaya suatu organisasi perbankan dapat dilihat dari 69,3 persen bank yang beroperasi di Indonesia belum mematuhi ketentuan *good corporate governance*.

Salah satu alat ukur kinerja dibidang perbankan adalah CAMEL. CAMEL adalah lima faktor keuangan yang digunakan Bank Indonesia untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank di Indonesia dalam faktor modal (*capital*), faktor kualitas aktiva produktif (*asset quality*), faktor manajemen (*management*), faktor rentabilitas (*earning ability*), dan faktor likuiditas (*liquidity*).

Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa masih rendahnya kinerja perbankan di Indonesia antara lain adalah angka LDR nasional per 30 Juni 2001 hanya sebesar 38%, dan komposisi *earning assets* perbankan per April 2001 masih didominasi oleh obligasi rekap dan bukan kredit. Selain itu, masih tingginya ketergantungan profitabilitas sektor perbankan pada obligasi rekap. Konsekuensi dari komposisi *earning assets* bank yang terpusat pada obligasi dan SBI, jelas mengakibatkan profitabilitas sektor perbankan sangat bergantung pada pendapatan bunga dari kedua instrument tersebut. NPL perbankan menunjukkan angka yang masih sangat tinggi. Secara nasional, angka NPL perbankan per Juni 2001 mencapai 17,60%. Angka ini jauh melampaui apa yang disarankan BI pada akhir tahun 2001, yaitu maksimal hanya 5% bagi setiap bank. Dengan tingginya angka NPL, jelas bahwa perbankan nasional masih akan disibukkan dengan upaya restrukturisasi kredit untuk menurunkan angka NPL. Angka NPL yang tinggi

akan membawa konsekuensi pembentukan PPAP (cadangan penghapusan aktiva produktif) yang tinggi sehingga menurunkan tingkat laba bank. Perkembangan kinerja bank umum pada periode tahun 2005 – 2011 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 1.1 Grafik Perkembangan Kinerja Bank Umum Periode Tahun 2005 – 2011



Sumber : SPI, Bank Indonesia

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa CAR (Capital Adequacy Ratio) mengalami penurunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, yang mengartikan kemampuan modal bank untuk aktiva yang mengandung resiko semakin menurun sehingga menyebabkan kinerja bank menurun. Pada rasio NPL (Non Performing Loan), semakin kecil rasio tersebut maka semakin sehat bank tersebut. Bank yang sehat maksimal 5%, maksudnya kredit macet di bank tersebut tidak lebih dari 5% dari total pembiayaan yang disalurkan. Pada tahun 2005 dan 2006 menunjukkan kinerja NPL yang jelek, tetapi setelah tahun 2006 memperlihatkan kinerja yang bagus. Semakin besar NPM (Net Profit Margin) suatu bank, maka semakin bagus kinerja bank tersebut. Pada gambar diatas menunjukkan pada tahun 2006 dan 2008 terlihat kinerja yang menurun, tetapi

setelah tahun 2008 telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. ROA (Return on Asset) terlihat dalam kondisi kinerja yang stabil, hanya terjadi penurunan laba pada tahun 2008. Kecenderungan LDR (Loan to Deposit Ratio ) pada tahun 2005 sampai tahun 2010 masih belum mencapai target BI sebesar 78% (LDR ideal berkisar antara 85%-110%). Dengan angka LDR yang cukup rendah tersebut dapat terlihat bahwa dana pihak ketiga yang masuk ke dalam bank umum masih lebih besar dari kredit yang disalurkan. Walaupun dari sisi likuidasi hal ini merupakan kabar baik yaitu perbankan nasional mempunyai likuiditas yang cukup tinggi untuk menutup kebutuhan pencairan dana yang tidak diduga sebelumnya, namun dari sisi pelaksanaan fungsi intermediasi bank hal ini justru berkebalikan. Rendahnya LDR berarti terdapat akses dana dalam perbankan dan bank tidak dapat mengoptimalkan dana yang telah dihimpunnya untuk mendapatkan earning yang seharusnya bisa diterima dari pemanfaatan akses dana tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini juga berarti bahwa kinerja penyaluran kredit perbankan nasional masih belum efisien padahal kredit dari perbankan diharapkan akan dapat mendorong pembangunan sektor riil dan dengan demikian mempercepat pertumbuhan nasional.

Di Indonesia penelitian *corporate governance* yang telah dilakukan oleh Herman Darwis menemukan bahwa praktik *good corporate governance* pada perusahaan publik yang mengikuti survei yang dilakukan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006 - 2008. Penelitian tersebut menghasilkan informasi bahwa implementasi GCG dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja

perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, alasan yang memotivasi penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bidang perbankan karena perbankan merupakan suatu bisnis berbasis kepercayaan masyarakat. Masyarakat menyimpan dananya di bank semata-mata berdasarkan kepercayaan bahwa dananya akan kembali ditambah sejumlah keuntungan yang berasal dari bunga. Selanjutnya dana tersebut akan diputar menjadi bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit dan pembelian surat berharga. Apabila tidak ditangani secara profesional, transparan dan hati-hati (*prudential banking*) akan menimbulkan risiko dan bencana bagi perbankan. Apalagi banyak bank yang menganggap GCG lebih sebagai biaya dan menghambat ekspansi usahanya, padahal penerapan GCG sangat penting dalam menunjang kemajuan kinerja perbankan. Dengan ini penulis tertarik untuk meneliti di bidang perbankan.

Berdasarkan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai penerapan *good corporate governance* ( Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit ) yang berhubungan dengan kinerja perusahaan dalam skripsi ini dengan mengambil judul “ **PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2012-2014** ”.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Kinerja perusahaan buruk ditentukan oleh penerapan tata perusahaan yang buruk juga, seperti Enron dan Worldcom yang memanipulasi laporan keuangan berakibat pailit dan menurunnya kinerja perusahaan
2. Perusahaan di Indonesia, salah satu Badan Usaha Milik Negara jasa konstruksi diduga melakukan rekayasa laporan keuangan sehingga menyebabkan kebangkrutan. Dalam industri perbankan, terjadinya kasus pembobolan di Citibank dan Bank Mega juga merupakan salah satu contoh bahwa penerapan *corporate governance* belum dilaksanakan dengan baik.
3. Kinerja bank umum menunjukkan penurunan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari tahun 2007 sampai pada tahun 2011 dan penurunan *Return On Asset* (ROA) terjadi pada tahun 2008 yang artinya penurunan kinerja perbankan ini menunjukkan nilai perusahaan yang buruk.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan – permasalahan yang teridentifikasi, maka penulis membatasi masalah dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Variabel dependen adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan CAMEL ( *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*).
2. Variabel independen meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit.

3. Perusahaan yang diamati pada industri perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2014.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah *kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komisaris independen* dan *komite audit* berpengaruh secara simultan terhadap *kinerja perusahaan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014 ?
2. Apakah *kepemilikan manajerial* berpengaruh secara parsial terhadap *kinerja perusahaan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014 ?
3. Apakah *kepemilikan institusional* berpengaruh secara parsial terhadap *kinerja perusahaan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014 ?
4. Apakah *dewan komisaris* berpengaruh secara parsial terhadap *kinerja perusahaan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014 ?
5. Apakah *komisaris independen* berpengaruh secara parsial terhadap *kinerja perusahaan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014 ?

6. Apakah *komite audit* berpengaruh secara parsial terhadap *kinerja perusahaan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014 ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komisaris independen* dan *komite audit* berpengaruh secara simultan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014.
2. Untuk mengetahui *kepemilikan manajerial* berpengaruh secara parsial terhadap *kinerja perusahaan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014.
3. Untuk mengetahui *kepemilikan institusional* berpengaruh secara parsial terhadap *kinerja perusahaan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014.
4. Untuk mengetahui *dewan komisaris* berpengaruh secara parsial terhadap *kinerja perusahaan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014.
5. Untuk mengetahui *komisaris independen* berpengaruh secara parsial terhadap *kinerja perusahaan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014.

6. Untuk mengetahui *komite audit* berpengaruh secara parsial terhadap *kinerja perusahaan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaannya dan dapat memanfaatkan prinsip GCG yang baik dalam perusahaan.
2. Bagi investor Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengambil kebijaksanaan untuk membuat keputusan investasi.
3. Bagi akademik dan penelitian selanjutnya Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang GCG mengenai penerapan prinsip – prinsip GCG dalam kegiatan perusahaan dan mengenai segala permasalahan dan penyelesaiannya.